

**RAPAT KERJA NASIONAL, SIMPOSIUM NASIONAL DAN KONFERENSI
NASIONAL ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA (APHTN-HAN)**

**“Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945”
Bali, 17-21 Mei 2022**

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) akan menggelar agenda strategis nasional, yaitu Rapat Kerja Nasional, Simposium dan Konferensi Nasional dengan tema besar “Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945”. Kegiatan ini diadakan di Bali, pada tanggal 17-21 Mei 2022 dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan pencegahan Covid-19 yang akan dihadiri oleh pengurus dan anggota APHTN-HAN yang merupakan akademisi/pakar hukum HTN-HAN se-Indonesia.

Tema “Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945” dipilih dalam rangka merespon dan merefleksikan 20 (dua puluh) tahun berjalannya kehidupan ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 hasil perubahan. Selama 20 tahun ini kehidupan kenegaraan tidak lepas dari isu-isu konstitusional seperti penataan legislasi, pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, perkembangan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, perkembangan kebijakan perizinan, sampai dengan wacana hadirnya pokok-pokok haluan negara. Isu-isu konstitusional tersebut perlu direspon mengingat sangat terkait dengan konsistensi bangsa Indonesia melaksanakan demokrasi konstitusional yang merupakan roh dari perubahan konstitusi di tahun 1999 – 2002. Kecenderungan menyelesaikan berbagai isu konstitusional tersebut hanya berdasarkan konsensus politik, niscaya akan mereduksi makna demokrasi konstitusional itu sendiri. Untuk itu diperlukan suatu forum keilmuan yang akan merefleksikan sekaligus memberikan solusi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan agar senantiasa mendasarkan pada negara hukum demokratis (demokrasi konstitusional).

Kegiatan Rakernas, Simposium dan Konferensi Nasional ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan peran dan kontribusi APHTN-HAN dalam kehidupan kebangsaan, memperkuat budaya akademik yang berbasis nilai-nilai keilmuan dan memberikan sumbangan pemikiran untuk merespon situasi dan kondisi penyelenggaraan ketatanegaraan kekinian. Dalam rangkaian kegiatan Rakernas, Simposium dan Konferensi Nasional, ada 3 (tiga) agenda besar yang akan dilaksanakan, yaitu:

Pertama, Rapat Kerja Nasional APHTN-HAN yang akan dibuka Prof. Dr. M. Guntur Hamzah (Ketua Umum APHTN-HAN) dan diikuti oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah dari 34 Provinsi yang akan membicarakan tentang bagaimana perkembangan

organisasi APHTN-HAN sekaligus peran APHTN-HAN selama ini sebagai suatu komunitas akademik dalam turut mengawal berjalannya praktik demokrasi konstitusional di Indonesia. Melalui Rakernas akan dihasilkan rekomendasi bagaimana memperkuat peran APHTN-HAN dalam dinamika pengembangan pengajaran HTN-HAN di berbagai perguruan tinggi serta peran dalam turut mengawal selalu tegaknya demokrasi konstitusional.

Kedua, disela Rakernas, akan diselenggarakan Simposium Nasional Hukum Tata Negara dengan tema "Penguatan Fungsi Perlindungan dan Kepastian Hukum Kementerian Hukum dan HAM Melalui Penguatan Layanan Ketatanegaraan. Simposium ini akan dibuka langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Prof. Yasonna H Laoly, serta akan menghadirkan narasumber antara lain, Mochammad Afifuddin (Komisioner KPU), Prof Zudan Arif Fakhrullah (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Cahyo R. Muhzar (Dirjen AHU Kemenkumham), dan Prof. Dr. Satya Arinanto (Staf Khusus Wakil Presiden/Guru Besar FH UI).

Ketiga, Konferensi Nasional APHTN-HAN (KNAPHTN-HAN) dengan tema "Dinamika Negara Hukum Demokratis Pasca Perubahan UUD 1945" yang akan menghadirkan narasumber Bambang Soesatyo, SE, M.BA (Ketua MPR), Prof (HC). Dr. Anwar Usman (Ketua Mahkamah Konstitusi), Dr. Ahmad Basarah (Wakil Ketua MPR); Prof. Dr. Arief Hidayat (Hakim MK); Prof. Dr. Saldi Isra (Hakim MK); Prof. Dr. Enny Nurbaningsih (Hakim MK); Hasyim Asy'ari, Ph.D (Ketua KPU), Prof. Dr. Mahfud MD (Menkopolhukam); Jend. Polisi (Purn.) Prof. M. Tito Karnavian (Mendagri), Dr. Ma'ruf Cahyono (Sekretaris Jenderal MPR); Dr. Inosentius Samsul (Kepala Badan Keahlian DPR); Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana (Kepala BPHN); Prof. Dr. Ni'matul Huda (Ketua APHTN-HAN); Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani (Dekan Fakultas Hukum UNS).

Dalam KNAPHTN-HAN tahun ini akan dihadiri 100 orang akademisi dan praktisi HTN-HAN dari berbagai Perguruan Tinggi dan Lembaga. Para Ahli HTN-HAN tersebut akan mempresentasikan paper yang telah terpilih melalui seleksi ketat dalam 5 panel, yaitu: (1) Penataan Legislasi dan Peraturan Kebijakan; (2) Pokok-pokok Haluan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia; (3) Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah; (4) Perkembangan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara; (5) Perizinan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Dari pembahasan konferensi nasional ini nantinya akan disusun rekomendasi terkait penataan hukum kenegaraan maupun hukum administrasi negara dalam rangka terus mengimplementasikan, menjaga dan merawat tegaknya demokrasi konstitusional di Indonesia. (R.R)